

**Analisis Penentuan Daerah Pusat Pertumbuhan/Pelayanan di  
Wilayah Kepulauan Maluku**  
*(Analysis of the Determination of Growth/Service Center Areas in the  
Maluku Islands Region)*

**Muhammad Imam Z. Bin Umar<sup>1</sup>, Fahrudin Ramly<sup>2</sup>, I.T.  
Matitaputty<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana UNPATTI,

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPATTI

Penulis Korespondensi: tonnymatitaputty@gmail.com

**ABSTRACT**

Determining an area to be a center of growth or service is very important and is influenced by its hinterland area. The development of an area as a growth/service center is determined by its readiness to become a growth center area. This study aims to determine the regencies/cities that can be considered feasible as growth centers or services in Maluku Province, especially in Ambon, Seram, and Buru islands. The analytical method used is the Scalogram and the Marshal Centrality Index. The results of the study showed that of the six research areas, Ambon City is still the center of growth or service in this area, while Central Maluku Regency can be an alternative area in the development of the Maluku region in the future.

**Keywords:** Growth center, Scalogram, The Marshal Centrality Index,

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan disamping meningkatkan stabilitas nasional, meningkatkan iklim investasi, dan menekan angka pengangguran. Ekonomi bisa dikatakantumbuh apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya (Mustika, 2010). Pembangunan adalah dasar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur publik (infrastruktur) adalah hal yang penting (Posumah, 2015).

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah dalam suatu kawasan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal

yang dimaksud adalah potensi ekonomi dan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, ketersediaan infrastruktur, dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi seperti fasilitas transportasi, ketersediaan pasar bagi output yang dihasilkan oleh daerah tersebut, dan faktor sejarah. Kondisi ekonomi regional, nasional, dan global, tingkat mobilitas perpindahan faktor produksi tenaga kerja, modal dan teknologi sebagai faktor eksternal serta output dari dan ke masing-masing daerah tersebut.

Adanya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah telah mendorong pemerintah di banyak negara untuk menerapkan konsep pengembangan ekonomi suatu wilayah

tertentu yang membedakan suatu daerah dengan wilayah lainnya. Konsep pengembangan wilayah ini didasarkan pada konsep atau teori yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonomi pembangunan wilayah. Dasar dari teori-teori tersebut yaitu pandangan perbedaan faktor endowment dari suatu wilayah sehingga menyebabkan wilayah tersebut menjadi sumber dan pendorong utama pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya (*hinterland*-nya) (Richardson, 1991).

Bentuk konsep pengembangan wilayah yang telah banyak diterapkan di beberapa negara maju ataupun negara sedang berkembang dalam rangka untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah melalui pemusatan kegiatan pembangunan pada wilayah atau sector ekonomi tertentu yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang menempatkan suatu daerah atau sector sebagai pusat pertumbuhan (*growth centre*) menjadi populer dan sangat dominan yang dipengaruhi oleh pemikiran dan paradigma pembangunan dan perencanaan wilayah (Rustiadi et al., 2009)

Mekanisme ini dikenal dengan *trickling down effect* atau *spread effect*. Melalui mekanisme ini, maka pembangunan yang terjadi pada pusat pertumbuhan atau pelayanan, secara sistematis dan gradual akan memberikan dampak positif pada daerah sekitarnya. Meskipun pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan (*growth centre*) bukan lagi merupakan strategi baru, tetapi sampai saat ini masih terus mendapat perhatian yang sangat besar dari para pengambil kebijakan ataupun perencana di berbagai negara, bahkan dianggap sebagai strategi yang dapat mengatasi

kesulitan dalam melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui daerah manakah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan atau pelayanan maka diinisiasi dengan potensi internal yang dimiliki seperti infrastruktur dasar untuk pelayanan publik.

Konsep wilayah tata ruang ekonomi dalam ilmu ekonomi sangat penting yang digunakan dalam mengkaji masalah pembangunan ekonomi dan pengembangan suatu wilayah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tata ruang ekonomi senantiasa mengalami perubahan akibat adanya pertumbuhan dari berbagai kegiatan ekonomi oleh para pelaku ekonomi, baik di wilayahnya sendiri maupun yang berasal dari luar wilayah lainnya. Penting konsep tata ruang ekonomi yang berkembang sangat pesat sebagai dasar pijak dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah pada beberapa dasawarsa terakhir. Dilihat dari segi hubungan formal pembangunan, maka tata ruang ekonomi merupakan tata ruang polarisasi, yaitu sebagai suatu tempat dimana terdapat konsentrasi atau pemusatan kegiatan-kegiatan ekonomi yang relatif besar dan berbeda nyata dengan *hinterland*-nya. Terdapat banyak ulasan dari berbagai pakar yang mengulas mengapa pada tahap awal pembangunan pembagian pendapatan cenderung memburuk untuk kemudian membaik. Hal ini dikaitkan dengan tahapan awal pertumbuhan yang terpusat di sektor industri modern seperti dalam model Lewis. Pada tahapan ini lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antara sektor industri modern dan sektor pertanian

tradisional pada awalnya akan melebar dengan cepat sebelumnya dan pada akhirnya menyempit kembali.

Era globalisasi dan otonomi daerah, maka wilayah telah menggantikan negara untuk memasuki perekonomian global. Kerjasama antar negara dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh hampir wilayah provinsi/kabupaten/kota, bahkan kluster industri yang sukses pada skala internasional seringkali berlokasi pada wilayah tertentu dalam suatu negara. Disinilah terjadi ketimpangan regional yang dapat ditelusuri, karena masing-masing daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda antara satu dengan lainnya sehingga pertumbuhan yang berlangsung akan berbeda pula. Adisasmita (2009) menyatakan bahwa adanya wilayah dengan pertumbuhan yang cepat (*fast growing regional*), wilayah dengan pertumbuhan lamban (*slow growing region*) dan beberapa wilayah lainnya termasuk wilayah mandeg (*stagnant*). Rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya dukungan institusional yaitu sistem organisasi dan manajemen di bawah satu kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, dan kondisi geografis yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran pembangunan suatu wilayah.

Berbagai literatur ekonomi regional ditemukan adanya strategi pembangunan tidak seimbang, yaitu strategi yang hanya menekankan kepada pengembangan salah satu sektor ekonomi atau wilayah yang dianggap potensial. Strategi ini difahami oleh ahli ekonomi sangat cocok untuk diterapkan pada negara-negara yang sedang berkembang yang memiliki kendala keterbatasan modal.

Intinya bahwa ditinjau dari sudut lokasi maka kegiatan ekonomi dan

pembangunan ekonomi daerah tidak merata pada semua sektor/wilayah tetapi mempunyai kecenderungan untuk mengelompok pada pusat-pusat pertumbuhan. Pusat-pusat pertumbuhan ini akan menentukan dan mendominasi perkembangan daerah lain yang lebih lambat perkembangannya. Jadi dalam proses pembangunan akan muncul sektor pemimpin (industri) atau wilayah (kutub, titik, daerah inti) yang menjadi penggerak utama (*prime mover*) dalam pembangunan suatu daerah. Apabila industri telah terkumpul dalam suatu kawasan tertentu, keadaan ini akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi. (Adisasmita, 2005).

Konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*) ini diperkenalkan oleh (Perroux, 1970), menekankan penggunaan istilah kutub pertumbuhan (*growth pole*). Penekanan pengertian ini dikaitkan pada ruang ekonomi, yakni sebagai medan kekuatan, dimana ruang ekonomi mengandung pusat-pusat dan kutub yang mempunyai kekuatan sentrifugal yang memancar ke sekeliling dan mempunyai kekuatan sentripetal yang menarik sekitarnya ke pusat-pusat tersebut. Tiap pusat merupakan pusat penarik dan penolak serta mempunyai medan sendiri dalam suatu gugus medan pusat-pusat yang lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan diseluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu.

Tata ruang diidentifikasi sebagai arena atau medan kekuatan yang didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat, dimana setiap kutub merupakan kekuatan pancaran pengeluaran keluar dan kekuatan tarikan ke dalam. Dalam proses pembangunan akan muncul industri pemimpin yang

menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah. Laba dari suatu industri merupakan fungsi dari tingkat produksi dalam industri tersebut dan output serta input dalam industri lainnya. Dengan kata lain, efisiensi dan tingkat produksi dalam suatu industri bukan saja bergantung pada industri tersebut tetapi juga pada industri lain yang erat hubungannya dengan industri pemimpin. Menurut Hansen, (1972), hubungan yang erat di antara berbagai industri menyebabkan suatu industri atau beberapa industri pemimpin berkembang sehingga pertambahan produksi tidak terbatas pada jumlah kenaikan produksi dalam industri pemimpin, tetapi juga erat kaitannya dengan kenaikan produksi industri lain. Proses selanjutnya adalah berkumpulnya industri dalam suatu daerah atau kawasan tertentu yang akan memperlancar proses pertumbuhan ekonomi, karena pengelompokan tersebut akan menciptakan konsumen yang berbeda pola konsumsinya dibandingkan dengan penduduk daerah pedesaan. Proses pertumbuhan industri yang terpusat dalam suatu kawasan akan menimbulkan ketidakseimbangan diberbagai daerah lain karena perkembangan dipusat-pusat industri akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh secara geografis pembangunan ekonomi tidak seimbang, maka suatu perekonomian merupakan gabungan dari sistem yang relatif aktif (industri pemimpin) dan industri yang relatif pasif (industri atau daerah yang tergantung pada kegiatan industri pemimpin). Pemusatan industri pemimpin pada suatu kawasan tertentu menjadi kutub pertumbuhan yang akan mempengaruhi daerah sekitarnya.

Pertumbuhan pada wilayah pertumbuhan melalui pengaruhnya pada wilayah sekitar maka pada gilirannya proses pembangunan atau pertumbuhan wilayah akan terjadi. Masing-masing wilayah pelayanan memiliki pusat pelayanan (tempat sentral) yang terdiri dari pusat besar, pusat sedang, dan pusat kecil yang tersusun secara hirarkis. Pusat besar mensubordinasi (membawahi) pusat-pusat sedang dan pusat-pusat sedang membawahi pusat-pusat kecil.

Secara vertikal tempat-tempat sentral yang lebih tinggi ordenya mensuplai barang-barang ke seluruh wilayah, sedangkan kebutuhan bahan mentah tempat sentral yang lebih tinggi ordenya disuplai oleh tempat sentral yang rendah ordenya. Pusat-pusat yang ordenya sama tidak saling melayani. Respon pusat atau tempat sentral menunjukkan ciri mekanisme pelayanan antara pusat dengan penduduk daerah belakang (*hinterland*). Jika terjadi pertumbuhan di daerah belakang, misalnya dalam bidang pertanian, maka melalui pola suplai hasil akan mendorong pertumbuhan di pusat pelayanan. Proses ini berlangsung melalui multiplier intra regional dan mungkin akan menimbulkan perubahan-perubahan struktural di pusat. Teori ini memiliki tiga konsep fundamental yaitu ambang (*threshold*), lingkup (*range*) dan hirarki (*hierarchy*). Konsep-konsep ini merupakan susunan spasial yang penting dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan formal permintaan dan wilayah perdagangan yang berbentuk heksagonal. Kontribusinya adalah telah merintis analisis tata ruang yang menekankan pada identifikasi sistim wilayah baik secara fisik atau ekonomi yang memiliki pola distribusi kegiatan produksi dan daerah perkotaan secara hirarki

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku dengan mengambil satu titik waktu yaitu tahun 2019. Data yang diperoleh kemudian dianalisis baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi daerah mana yang termasuk pusat pertumbuhan atau pelayanan Metode analisis yang

digunakan adalah: Analisis Skalogram dan indeks Sentralitas Marshal.

Analisis skalogram dimaksudkan untuk mengetahui daerah mana yang dapat menjadi pusat pelayanan dalam interaksi social dan ekonomi. Untuk maksud tersebut, maka diujia apakah layak atau tidak dengan menggunakan rumus koefisien Reprodusibilitas (Coefficient Of Reproducibility/COR) dengan persamaan:

$$COR = 1 - \frac{\sum e}{N \times K}$$

Di mana:

COR = Coefficien Of Reproducibility

E = Jumlah kesalahan

N = Jumlah subjek/Kabupaten/kota

K = Jumlah objek/Fasilitas

Dalam hal ini koefisien dianggap layak jika bernilai antara 0,9 – 1.

## 2. Indeks Sentralitas Marshall

Analisis indeks Sentralitas Marshal digunakan untuk menentukan tingkatan Ordo dan posisi masing-masing

kabupaten/kota. Rumus yang digunakan adalah:

$$C = \frac{t}{T}$$

di mana:

C = Bobot

t = nilai sentralitas

T = Jumlah Total Infrastruktur masing-masing Kabupaten/Kota

Hasil Perhitungan indeks Sentralitas Marshall untuk menentukan kelayakan suatu daerah untuk dijadikan sebagai pusat pelayanan. Analisis gabungan kedua metode ini pernah dikaji oleh

(Endang Sri Utami, 2015) yang menggambarkan daerah-daerah tertentu yang berpotensi sebagai daerah pertumbuhan dan pelayanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dengan menggunakan *Skalogram dan Indeks Sentralitas*

*Marshal* dimaksudkan untuk mengetahui daerah mana yang dapat dianggap

sebagai daerah pusat pertumbuhan atau pelayanan. Berdasarkan data yang diperoleh untuk berbagai infrastruktur

yang dimiliki oleh masing-masing daerah pada Tahun 2019 yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Fasilitas Berdasarkan Kabupaten/Kota pada Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Fasilitas Pendidikan								Fasilitas Kesehatan					Fasilitas Ekonomi								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Ambon	354	15	49	10	34	19	7	12	22	349	16	11	23	13	91	983	61	59	114	3	1	
SBB	204	24	89	22	38	14	11	1	19	281	2	1	5	25	4	233	10	59	25	2	0	
SBT	150	17	53	21	22	8	9	2	22	290	3	2	5	20	3	199	6	73	22	5	1	
Malteng	391	40	137	41	79	14	18	5	35	95	5	4	16	4	12	68	28	109	79	6	3	
Buru	145	10	53	13	15	9	5	1	12	42	1	1	12	4	3	664	11	129	30	1	1	
Buru Selatan	108	4	47	6	15	10	3	0	12	34	0	2	7	1	1	19	2	35	13	2	1	
Jumlah	1352	110	428	113	203	74	53	21	122	1091	27	21	68	67	114	2166	118	464	283	19	7	

Lanjutan :

Kabupaten/Kota	Fasilitas Keagamaan					Fasilitas Olah Raga						
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Ambon	175	291	8	1	1	19	23	14	8	3	7	5
SBB	134	109	5	0	0	60	76	11	2	0	5	2
SBT	284	12	7	1	3	115	153	10	8	3	3	0
Malteng	267	279	21	0	1	132	150	24	12	9	16	6
Buru	129	42	10	1	11	64	66	22	8	7	15	6
Buru Selatan	63	55	0	0	1	37	51	3	1	0	2	0
Jumlah	1052	788	51	3	17	427	519	84	39	22	48	19

Berdasarkan pada Tabel 1, maka dapat dibuat skalogram dengan terlebih dahulu untuk menentukan ada tidaknya fasilitas tentu di suatu daerah dengan memberikan angka 1 untuk daerah yang

memiliki fasilitas, sedangkan daerah yang tidak memiliki fasilitas diberikan angka 0. Hasil pemberian nilai tersebut kemudian dihitung nilai COR-nya sebagai berikut:

$$COR = 1 - \frac{12}{6 \times 33}$$

$$COR = 1 - 0,060$$

$$COR = 0,94$$

Dari hasil analisis skalogram dapat dinyatakan layak untuk menentukan orde pusat pelayanan.

### Perhitungan jumlah orde

Setelah mengetahui kelayakan sebuah data skalogram, maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Orde} &= 1 + 3,3 \log N \\ &= 1 + 3,3 \log 0,778 \\ &= 3,57 = 4 \end{aligned}$$

Yang berarti jumlah orde yang ada di kawasan ini adalah sebanyak 4. Selanjutnya dilakukan perhitungan interval dengan rumus: (Jumlah Dengan demikian pembagian orde berdasarkan jumlah fasilitas yang

jumlah orde menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{tertnggi-jumlah terendah) / jumlah Orde atau } \frac{(33 - 27)}{4} = 1,5$$

dimiliki oleh setiap daerah yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. hasil Range Orde Skalogram

Range Orde	Interval (1,5)
Orde I	31,52 – 33,02
Orde II	30,01 – 31,51
Orde III	28,50 – 30,00
Orde IV	26,99 – 28,49

Sumber: data diolah

Berdasarkan pembagian orde tersebut, maka diharapkan bahwa wilayah yang menempati Orde I dapat menjadi wilayah yang lebih baik dari orde lainnya. Hal ini disebabkan oleh penyediaan infrastruktur sangat besar

pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian analisis skalogram, maka ditentukan hirarki menurut daerah kabupaten/kota (Tabel 3).

Tabel 3. Orde dari masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Kabupaten/Kota	Orde	Jumlah Fasilitas
Ambon	I	33
Seram Bagian Timur	I	32
Maluku Tengah	I	32
Buru	I	33
Seram Bagian Barat	III	29
Buru Selatan	IV	27

Sumber: Tabel 1, data diolah kembali

Berdasarkan Tabel 3, maka dapat dikatakan bahwa dari hasil analisis scalogram hirarki kabupaten/kota, maka wilayah Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, dan Buru menempati orde I dengan memiliki fasilitas masing-masing 33, 32, 32 dan 33. Hal ini selanjutnya dapat dikatakan bahwa daerah dengan fasilitas terbanyak dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Adanya kelengkapan

fasilitas dapat diartikan sebagai media untuk semakin intensifnya interaksi demografis antar daerah yang pada gilirannya interaksi ekonomi yang melahirkan pertumbuhan ekonomi.

Analisis indeks Sentralitas Marshal digunakan untuk menentukan tingkatan ordo dan posisi dari masing-masing kabupaten/kota. Rumus yang digunakan adalah:

$$C = \frac{t}{T} \text{ di mana:}$$

C = Bobot

t = nilai sentralitas

T = Jumlah Total Infrastruktur masing-masing Kabupaten/Kota

Hasil perhitungannya menggunakan rumus ini terlihat bahwa nilai bobot tertinggi berturut-turut yaitu 857,40 (Kota Ambon) dan terendah sebesar

176,85 (Kabupaten Buru Selatan). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan jumlah Orde dan nilai masing-masing Orde serta posisi masing-masing

kabupaten/kota, dengan terlebih dahulu membuat interval Orde (range) dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Range} &= (\text{Nilai tertinggi} - \text{nilai terendah})/\text{Orde} \\ &= (857,40 - 176,85)/4 \\ &= 171,18 \end{aligned}$$

Setelah diketahui jumlah bobot masing-masing infrastruktur di setiap Kabupaten/Kota, maka dapat hasil Orde Tabel 4. Nilai Bobot Indeks Marshal

Marshal dari setiap Kabupaten/kota disajikan pada Tabel 4.

Orde	Range = 171,18
Orde I	692 – 863,18
Orde II	520 – 691,18
Orde III	348 – 519,18
Orde IV	176 – 347,18

Sumber: data diolah kembali

Berdasarkan hasil perhitungan kelas dari masing-masing Kabupaten/Kota atau Orde tersebut, maka ditentukan Orde (Tabel 5).

Tabel 5. Hasil Penilaian Indeks Sentralitas Marshal

Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur	Orde
Ambon	857,40	I
Maluku Tengah	849,19	I
Buru	527,87	II
Seram Bagian Timur	491,19	III
Seram Bagian Barat	397,67	III
Buru Selatan	176,85	IV

Sumber: data diolah kembali

Tabel 5, memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan yang drastis dengan posisi masing-masing Kabupaten/Kota pada

Orde Skalogram, kecuali Kabupaten Buru turun menjadi Orde II dan Seram Bagian Timur menjadi Orde III.

### Penentuan Pusat Pertumbuhan

Berdasarkan pada hasil analisis berbagai metode yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa beberapa daerah dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan antara lain:

1. Kota Ambon
2. Kabupaten Maluku Tengah
3. Kabupaten Seram Bagian Timur
4. Kabupaten Buru.

Jika dilihat jumlah ketersediaan infrastruktur atau fasilitas pemerintahan, ekonomi, keagamaan dan olah raga,

maka Kota Ambon masih merupakan pilihan terbaik sebagai daerah Pusat Pertumbuhan utama atau Pusat Pelayanan di kawasan ini. Satu hal yang menarik dari analisis ini, ternyata Kabupaten Induk sebelum terjadinya pemekaran dapat menjadi alternatif sebagai pusat pertumbuhan atau pusat pelayanan seperti Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Hal ini terlihat dari posisinya dalam penentuan Orde, yaitu Kabupaten Maluku Tengah

selalu menempati Orde I, baik dalam analisis Skalogram ataupun Indeks Sentralitas Marshal, sedangkan Kabupaten Buru menempati Orde I dan II. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pemekaran wilayah menyebabkan Kabupaten Maluku Tengah dan Pulau Buru memiliki infrastruktur di bidang pemerintahan, kesehatan, dan perbankan maupun bidang lainnya yang cukup tersedia di kedua kabupaten/kota ini dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemekaran yang terjadi akan menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan yang baru sehingga akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Induk maupun kabupaten yang sudah mengalami pemekaran. Menurut Juanda, (2007), tujuan pemekaran daerah yang memiliki suatu pemerintahan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah makin mandiri dan demokratis. Selanjutnya oleh Lomcolon (2006),

pembangunan ekonomi adalah suatu proses mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola, kemitraan antara, pemerintah daerah dengan sektor swasta, untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Isu Kabupaten Maluku Tengah akan dijadikan sebagai ibu kota Provinsi, menjadi semakin penting karena dari hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengambil keputusan. Hal ini akan menjadi prioritas ke depan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagai pusat pertumbuhan baru dengan wilayah yang masih memiliki luasan wilayah yang cukup luas untuk dikembangkan wilayah ekonomi baru sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Maluku.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). Kota Ambon merupakan pilihan terbaik untuk menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan di kawasan ini; 2). Kabupaten Maluku Tengah dapat

menjadi alternatif dalam perspektif jangka panjang, apalagi isu pemindahan ibu kota provinsi ke daerah ini, maka hasil kajian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2005). *Teori Lokasi Dan Pengembangan Wilayah*. Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Endang Sri Utami, M. (2015). Analisis Sistem Pusat Pelayanan Permukiman Di Kota Yogyakarta Tahun 2014. *Jurnal Jejak*, 8(1)., 8(1).
- Hansen, M. . (1972). *Criteria For a Growth Centre Policy*. Mouton, The Haque.
- Juanda, B. (2007). Manfaat dan Biaya Pemekaran Daerah Serta Implikasinya Terhadap

- APBN. *Jurnal Ekonomi*, 25.
- Lomcolon, A. (2006). *Pengantar perencanaan pembangunan ekonomi daerah* (Edisi Ketu). BPFE.
- Mustika, A. (2010). *Analisis Tingkat Pengangguran: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Semarang*. Universitas Indonesia.
- Perroux, F. (1970). Economic space: theory and applications. *Quarterly Journal of Economics*, 64, 89–104.
- Posumah, F. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Investasi Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, 15(2).
- Richardson, H. . (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional* (P. Sitohang (ed.)). Penerbit FE – UI.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Obor.